

SKRIPSI

PERAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI :STUDI SEKRETRIAT INSPEKTORAT KABUPATEN 50 KOTA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

ANDIKA DWI RAMADHAN

2110117024

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

PEMBIMBING:

Dr. Nani Mulyati, S.H.,M.CL.

Dr. Edita Elda, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

No.Reg: 01/PK-IV/V/2025

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Andika Dwi Ramadhan	No. Alumni Fakultas:
	a. Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/01 Desember 2001 b. Nama Orang tua : Ismet Wandii, Evi Susanti c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2110117024	f. Tanggal Lulus : 29 Oktober 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studii : 4 Tahun 2 Bulan i. IPK : 3,73 j. Alamat : Kel. Ompang Tanah Sirah, Payakumbuh Utara	

PERAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

: STUDI SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN 50 KOTA

(Andika Dwi Ramadhan, 2110117024 Fakultas Hukum Universitas Andalas, 92 Halaman, 2025)

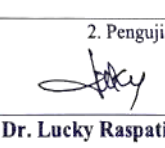
ABSTRAK

Dalam rentang waktu 2004 hingga 11 September 2024, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kasus gratifikasi dan penyuapan mendominasi tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu cara mencegah dan memberantas gratifikasi dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan tujuan untuk mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi dan menerima laporan gratifikasi. Di Sumatera Barat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) juga sudah dibentuk salah satunya di Kabupaten 50 Kota yang berada pada Inspektorat Kabupaten 50 Kota, namun yang menjadi kendala dalam efektifitas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tersebut adalah belum banyak diketahui oleh Pejabat atau ASN yang ada di Kabupaten 50 Kota. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan Kabupaten 50 Kota? 2. Bagaimanakah kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten 50 Kota dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi di sektor pemerintahan daerah? 3. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten 50 Kota dalam upaya pencegahan tindak pidana gratifikasi? Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Dari hasil penelitian, Peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam upaya pencegahan tindak pidana gratifikasi yaitu membentuk struktur kepengurusan dan melaksanakan program 1 nagari antikorupsi per 1 kecamatan serta melakukan sosialisasi dan edukasi. Kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) diukur menggunakan indikator jumlah kasus dan dalam peningkatan kinerjanya mengikuti perkembangan digital dengan mengikuti seminar-seminar online online. Kendala yang dihadapi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) salah satunya adalah rendahnya kesadaran pejabat/ASN terkait tindak pidana gratifikasi, kemudian upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah setiap instansi atau dinas membuat regulasi atau peraturan yang mewajibkan pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari laporan kerja tahunan pejabat/ASN, sedangkan upaya dilakukan unit tersebut adalah Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi setiap pejabat/ASN dengan diberikan pelatihan dan bimbingan (Dalam Perencanaan).

Kata Kunci: Gratifikasi; Pencegahan dan Pemberantasan; Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Pemerintahan Daerah

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 29 Oktober 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. Penguji I 	2. Penguji II 
Nama Terang	Prof. Arla Zurnetti, S.H., M.H	Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan:

	No. Alumni University:	Name:	No. Alumni Faculty:
	a. Place/Date of Birth : Payakumbuh/01 Desember 2001 b. Parent Name : Ismet Wandu, Evi Susanti c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. NIM : 2110117024	f. Graduation Date : Oktober, 29 th 2025 g. Predikat Honors : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years 2 Months i. GPA : 3.73 j. Address : Kel. Ompang Tanah Sirah, Payakumbuh Utara	

THE ROLE OF THE GRATIFICATION CONTROL UNIT (UPG) IN EFFORTS TO PREVENT CRIMINAL ACTS OF GRATIFICATION: A STUDY OF THE SECRETARIAT OF THE INSPECTORATE REGENCY 50 CITY

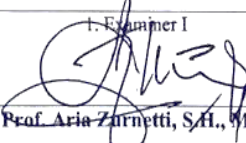
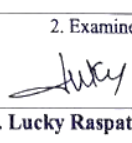
(Andika Dwi Ramadhan, 2110111152, Faculty of Law Universitas Andalas, 92 Pages, 2025)

ABSTRACT

From 2004 to September 11, 2024, data from the Corruption Eradication Commission (KPK) shows that cases of gratification and bribery have dominated corruption crimes in Indonesia. One of the ways to prevent and eradicate gratification is through the establishment of the Gratification Control Unit (UPG), with the goal of managing state or regional finances to control gratification and receive gratification reports. In West Sumatra, the Gratification Control Unit (UPG) has also been established, one of which is in the 50 Kota Regency under the supervision of the 50 Kota Regency Inspectorate. However, a key challenge in the effectiveness of this UPG is that it is not widely known by officials or ASN (State Civil Apparatus) in 50 Kota Regency. The research questions in this study are as follows: 1. What is the role of the Gratification Control Unit (UPG) in preventing corruption crimes in the government sector of 50 Kota Regency? 2. How is the performance of the Gratification Control Unit (UPG) at the Secretariat of the 50 Kota Regency Inspectorate in eradicating gratification crimes in the regional government sector? 3. What are the challenges faced by the Gratification Control Unit (UPG) at the Secretariat of the 50 Kota Regency Inspectorate in preventing gratification crimes, and what efforts have been made to address these challenges? The research method used is empirical research through interviews with the Gratification Control Unit (UPG). The research findings show that the role of the Gratification Control Unit (UPG) in preventing gratification crimes includes forming an organizational structure and implementing the 1 Nagari Anticorruption program for each subdistrict, as well as conducting socialization and education efforts. The performance of the Gratification Control Unit (UPG) is measured using indicators such as the number of cases handled, and in improving its performance, it follows digital developments by attending online seminars. One of the challenges faced by the Gratification Control Unit (UPG) is the low awareness among officials/ASN regarding gratification crimes. To address this challenge, the study suggests that each agency or department should create regulations that require the reporting of gratification as part of the annual work report of officials/ASN. The unit's efforts include improving the capacity and competence of officials/ASN by providing training and guidance (as part of planning).

Keywords: Gratification; Prevention and Eradication; Gratification Control Unit (UPG); Regional Government

This thesis has been defended in front of the Examination Committee and declare passed on October 29th, 2025.
Examiner,

Signature	1. Examiner I 	2. Examiner II 
Nama Terang	Prof. Aria Zurnetti, S.H., M.H	Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H

Acquainted,
Head of the Departement of Criminal Law : Riki Afrizal, S.H., M.H


Signature

The graduate has registered with the Faculty/University and has been assigned an alumni member:

	Faculty Officer/University	
No. Faculty Alumni	Name:	Signature:
No. University Alumni	Name:	Signature: